

## PENGELOLAAN PROGRAM KETAHANAN PANGAN BUMDES OLEH PEMERINTAH DESA DI DESA PURWASARI KABUPATEN KARAWANG

Syahirul Alim <sup>(1)</sup>, Mochamad Faizal Rizki <sup>(2)</sup>, Indra Aditya <sup>(3)</sup>

<sup>123</sup>Ilmu Pemerintahan, Universitas Singaperbangsa Karawang

Email: [1910631180123@student.unsika.ac.id](mailto:1910631180123@student.unsika.ac.id)

### ABSTRACT

*This study aims to examine the role of the Village Government in managing the food security unit of Village-Owned Enterprises (BUMDes) in Purwasari Village, Karawang Regency. The research was motivated by the transition of the BUMDes business unit from sheep fattening to food security businesses, including catfish farming, broiler ducks, and laying hens, due to various obstacles encountered in the previous business management. This study used a qualitative method with a case study approach. Data were collected through observation, interviews, and documentation. The informants consisted of the Village Head, BUMDes management, village officials, and the people of Purwasari Village. The results show that the Purwasari Village Government has direct involvement in managing the BUMDes food security unit through guidance, supervision, evaluation, decision-making, and financial and regulatory support. BUMDes managers are responsible for operational activities, administrative management, financial management, and business development. However, the management process still faces several challenges, such as limited human resources, suboptimal administrative management, environmental changes caused by industrial development, and low public trust resulting from the failure of the previous business unit. The study concludes that the management of the BUMDes food security unit is influenced by individual roles, organizational expectations, and organizational environment as explained in Rosally's theory (2015). Organizational expectations are directed toward increasing village original income (PADes), creating employment opportunities, and supporting the economic improvement of the village community.*

**Keywords:** Role of Village Government, BUMDes, Food Security, BUMDes Management, Purwasari Village.

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Pemerintah Desa dalam pengelolaan unit ketahanan pangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Purwasari Kabupaten Karawang. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya perubahan unit usaha BUMDes dari penggemukan domba menjadi unit ketahanan pangan berupa budidaya lele, bebek pedaging, dan ayam petelur akibat berbagai kendala dalam pengelolaan usaha sebelumnya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini terdiri dari Kepala Desa, pengurus BUMDes, perangkat desa, dan masyarakat Desa Purwasari. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Purwasari memiliki keterlibatan langsung dalam pengelolaan unit ketahanan pangan BUMDes melalui pembinaan, pengawasan, evaluasi, pengambilan keputusan, serta dukungan anggaran dan regulasi terhadap kegiatan usaha BUMDes. Pengelola BUMDes memiliki tanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan usaha, pengelolaan administrasi, pengelolaan anggaran, dan pengembangan usaha. Akan tetapi, pengelolaan unit ketahanan pangan BUMDes masih menghadapi beberapa hambatan seperti keterbatasan sumber daya manusia, pengelolaan administrasi yang belum optimal, kondisi lingkungan desa yang berkembang menjadi

kawasan industri, serta rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat akibat kegagalan usaha sebelumnya. Berdasarkan teori Rosally (2015), pengelolaan unit ketahanan pangan BUMDes di Desa Purwasari dipengaruhi oleh peran individu, harapan organisasi, dan lingkungan organisasi. Harapan organisasi terhadap pengelolaan BUMDes diarahkan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes), membuka lapangan pekerjaan, dan membantu perekonomian masyarakat desa.

**Kata Kunci:** Peran Pemerintah, Desa, Ketahanan Pangan,

## 1. Pendahuluan

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal usul, adat istiadat, dan kebutuhan masyarakat setempat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Melalui undang-undang tersebut, pemerintah desa diberikan kewenangan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat desa. Salah satu bentuk kewenangan desa dalam bidang ekonomi adalah pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Dalam Pasal 87 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dijelaskan bahwa desa dapat mendirikan BUMDes yang dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan. Keberadaan BUMDes diharapkan mampu menjadi instrumen ekonomi desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mendukung kemandirian desa.

Ketentuan mengenai pengelolaan BUMDes juga diperkuat melalui Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa yang menjelaskan bahwa BUMDes merupakan badan hukum yang didirikan oleh desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi, dan menyediakan pelayanan bagi masyarakat desa.

Menurut Suparji (2019), BUMDes merupakan lembaga ekonomi desa yang dibentuk untuk mengelola potensi lokal desa sehingga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat desa. Oleh

karena itu, pengelolaan BUMDes memerlukan dukungan pemerintah desa, pengelola yang kompeten, serta partisipasi masyarakat agar usaha yang dijalankan dapat berkembang secara berkelanjutan.

Pada praktiknya, pengelolaan BUMDes di berbagai daerah masih menghadapi berbagai kendala. Penelitian Emanuel Runiuk Kunja (2021) menunjukkan bahwa pengelolaan BUMDes sering mengalami hambatan akibat lemahnya pembinaan pemerintah desa, rendahnya kualitas sumber daya manusia, dan kurang optimalnya pengawasan organisasi. Penelitian Fifianti, Alias, dan Ansyari Mone (2018) juga menjelaskan bahwa lemahnya koordinasi antara pemerintah desa, pengelola, dan pengawas BUMDes menyebabkan pengelolaan usaha tidak berjalan sesuai tujuan awal pembentukan BUMDes. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan pengelolaan BUMDes tidak hanya dipengaruhi oleh modal usaha, tetapi juga dipengaruhi oleh peran pemerintah desa dan kemampuan pengelola organisasi.

Kabupaten Karawang menjadi salah satu daerah yang mendorong pengembangan BUMDes sebagai bagian dari pembangunan ekonomi desa. Pemerintah Kabupaten Karawang telah mengatur pengelolaan BUMDes melalui Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Badan Usaha Milik Desa. Peraturan tersebut menjelaskan bahwa pemerintah daerah memiliki peran dalam pembinaan, pengawasan, pendampingan, dan penguatan kelembagaan BUMDes agar mampu berkembang sesuai potensi desa masing-masing.

Desa Purwasari merupakan salah satu desa di Kabupaten Karawang yang memiliki BUMDes dengan unit usaha di bidang ketahanan pangan. Berdasarkan hasil wawancara dengan pengurus BUMDes, pada awalnya salah satu usaha yang dijalankan adalah penggemukan domba. Akan tetapi, usaha tersebut mengalami berbagai kendala seperti tingginya angka kematian ternak, keterbatasan sumber daya manusia, serta lemahnya pengelolaan usaha sehingga tidak dapat berjalan sesuai target yang diharapkan. Kondisi tersebut kemudian menjadi bahan evaluasi pemerintah desa bersama pengurus BUMDes melalui musyawarah desa.

Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, pada tahun 2025 unit usaha penggemukan domba dialihkan menjadi unit ketahanan pangan berupa budidaya bebek pedaging, budidaya lele, pembibitan lele, dan peternakan ayam petelur. Dalam pengembangannya, pemerintah desa memberikan dukungan anggaran sebesar Rp400.000.000 untuk program ketahanan pangan dan Rp100.000.000 untuk usaha reguler di luar program ketahanan pangan. Saat ini unit usaha ketahanan pangan BUMDes Purwasari terdiri dari 1.000 ekor

## **2. Metode**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Metode kualitatif digunakan karena penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menganalisis secara mendalam mengenai peran Pemerintah Desa dalam pengelolaan unit ketahanan pangan BUMDes di Desa Purwasari Kabupaten Karawang berdasarkan kondisi yang terjadi di lapangan.

Menurut Creswell (2018), penelitian kualitatif digunakan untuk mengeksplorasi dan memahami makna dari permasalahan sosial maupun fenomena yang terjadi dalam masyarakat. Sementara itu, Sugiyono (2022) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif digunakan untuk

bebek pedaging, 15.000 bibit lele, 3.000 ekor lele konsumsi, dan 500 ekor ayam petelur. Hasil usaha tersebut sebagian dipasarkan kepada masyarakat Desa Purwasari dengan harga yang lebih rendah dibandingkan harga pasar umum.

Meskipun program ketahanan pangan di BUMDes Purwasari telah berjalan, pengelolaannya masih menghadapi beberapa kendala seperti keterbatasan sumber daya manusia, pengelolaan administrasi yang belum optimal, serta kondisi lingkungan Desa Purwasari yang berkembang menjadi kawasan industri. Selain itu, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan BUMDes juga masih menjadi tantangan setelah kegagalan unit usaha sebelumnya. Dalam kondisi tersebut, pemerintah desa masih memiliki keterlibatan dalam pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan pengambilan keputusan terhadap kegiatan usaha BUMDes.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Kepala Desa, peran pengelola BUMDes, serta harapan organisasi dalam pengelolaan unit ketahanan pangan BUMDes di Desa Purwasari Kabupaten Karawang melalui pendekatan studi kasus

meneliti kondisi objek yang alamiah dengan peneliti sebagai instrumen utama dalam pengumpulan data.

Pendekatan studi kasus digunakan karena penelitian ini berfokus pada satu objek penelitian, yaitu pengelolaan unit ketahanan pangan BUMDes di Desa Purwasari Kabupaten Karawang. Menurut Yin (2018), studi kasus digunakan untuk memahami suatu fenomena secara mendalam dalam kehidupan nyata. Pemilihan pendekatan studi kasus didasarkan pada adanya perubahan pengelolaan usaha BUMDes dari penggemukan domba menjadi unit ketahanan pangan berupa budidaya bebek pedaging, ayam petelur, dan budidaya lele. Selain itu, pengelolaan usaha tersebut

masih menghadapi beberapa kendala seperti keterbatasan sumber daya manusia, pengelolaan administrasi, dan pengawasan organisasi.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung melalui observasi dan wawancara dengan Kepala Desa Purwasari, perangkat desa, pengelola BUMDes, dan masyarakat yang terlibat dalam pengelolaan unit ketahanan pangan BUMDes. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari dokumen, arsip, laporan kegiatan, laporan keuangan, struktur organisasi, serta berbagai literatur dan peraturan yang berkaitan dengan pengelolaan BUMDes.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dilakukan secara langsung terhadap aktivitas pengelolaan unit ketahanan pangan BUMDes di Desa Purwasari. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur kepada Kepala Desa, perangkat desa, pengelola BUMDes, dan masyarakat untuk memperoleh informasi mengenai peran pemerintah desa, pengelolaan usaha, hambatan pengelolaan, serta harapan organisasi terhadap pengembangan BUMDes. Dokumentasi digunakan untuk mendukung data hasil observasi dan wawancara melalui dokumen, laporan, dan dokumentasi kegiatan BUMDes.

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model Miles dan Huberman yang terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan memilih dan memfokuskan data yang sesuai dengan kebutuhan penelitian. Penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian deskriptif berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi. Selanjutnya, penarikan kesimpulan dilakukan dengan menganalisis hubungan antara peran pemerintah desa, pengelola BUMDes, dan harapan organisasi dalam pengelolaan unit

ketahanan pangan BUMDes di Desa Purwasari Kabupaten Karawang.

### **3. Hasil dan Pembahasan**

#### **1. Peran Kepala Desa dalam Pengelolaan Unit Ketahanan Pangan BUMDes**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Purwasari memiliki keterlibatan langsung dalam pengelolaan unit ketahanan pangan BUMDes. Keterlibatan tersebut terlihat melalui pembinaan, pengawasan, evaluasi, pengambilan keputusan, serta dukungan regulasi dan anggaran terhadap kegiatan usaha BUMDes. Kepala Desa Purwasari berperan sebagai pembina BUMDes yang ikut terlibat dalam proses perencanaan hingga evaluasi kegiatan usaha.

Pada awalnya, salah satu unit usaha yang dijalankan oleh BUMDes Purwasari adalah penggemukan domba. Akan tetapi, usaha tersebut mengalami berbagai kendala seperti tingginya angka kematian ternak, keterbatasan sumber daya manusia, serta lemahnya pengelolaan usaha sehingga tidak dapat berjalan sesuai target organisasi. Kondisi tersebut kemudian menjadi bahan evaluasi pemerintah desa bersama pengurus BUMDes melalui musyawarah desa.

Keterlibatan pemerintah desa dalam proses evaluasi dan pengambilan keputusan menunjukkan bahwa pemerintah desa masih memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap keberlangsungan kegiatan usaha BUMDes. Dalam teori Rosally (2015), pelaksanaan peran individu dalam organisasi berkaitan dengan tugas, tanggung jawab, dan keterlibatan individu dalam organisasi. Dalam penelitian ini, Kepala Desa tidak hanya menjalankan fungsi administratif pemerintahan desa, tetapi juga menjalankan fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan BUMDes.

Berdasarkan hasil evaluasi, unit usaha penggemukan domba kemudian dialihkan menjadi unit ketahanan pangan berupa budidaya bebek pedaging, budidaya

lele, pembibitan lele, dan ayam petelur. Pengalihan usaha tersebut dilakukan pada tahun 2025 melalui musyawarah desa bersama pemerintah desa dan pengurus BUMDes. Saat ini unit ketahanan pangan BUMDes Purwasari terdiri dari 1.000 ekor bebek pedaging, 15.000 bibit lele, 3.000 ekor lele konsumsi, dan 500 ekor ayam petelur.

Selain melakukan pengawasan dan evaluasi, pemerintah desa juga memberikan dukungan anggaran terhadap pengembangan unit ketahanan pangan BUMDes. Pada tahun 2025 BUMDes Purwasari memperoleh anggaran sebesar Rp400.000.000 untuk program ketahanan pangan dan Rp100.000.000 untuk usaha reguler di luar program ketahanan pangan. Dukungan tersebut menunjukkan adanya keterlibatan pemerintah desa dalam pengembangan kegiatan usaha BUMDes.

Dalam pelaksanaannya, pemerintah desa juga secara rutin melakukan evaluasi terhadap kegiatan usaha BUMDes melalui rapat kerja, laporan pertanggungjawaban, dan musyawarah perencanaan kegiatan usaha. Kegiatan evaluasi tersebut dilakukan agar kegiatan usaha yang dijalankan dapat berjalan sesuai target organisasi dan tidak kembali mengalami kegagalan seperti unit usaha sebelumnya.

Namun demikian, pengelolaan unit ketahanan pangan BUMDes di Desa Purwasari masih menghadapi beberapa hambatan. Salah satu hambatan yang ditemukan adalah keterbatasan sumber daya manusia dalam pengelolaan usaha dan administrasi organisasi. Selain itu, kondisi Desa Purwasari yang berkembang menjadi kawasan industri juga mempengaruhi keterlibatan masyarakat dalam kegiatan usaha BUMDes karena sebagian masyarakat lebih memilih bekerja di sektor industri dibandingkan usaha peternakan dan perikanan desa.

Kondisi tersebut berkaitan dengan aspek lingkungan organisasi dalam teori Rosally (2015). Lingkungan organisasi merupakan faktor yang dapat

mempengaruhi pelaksanaan kegiatan organisasi baik dari faktor internal maupun eksternal. Dalam penelitian ini, kondisi lingkungan desa dan keterbatasan sumber daya manusia menjadi faktor yang mempengaruhi keberlangsungan kegiatan usaha BUMDes.

Hasil penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian Haeril Anwar (2020) yang menjelaskan bahwa pengelolaan BUMDes dapat berjalan apabila terdapat koordinasi dan pengawasan antara pemerintah desa dan pengurus BUMDes. Selain itu, penelitian Indrawati, Adnan, dan Ibrahim (2020) juga menjelaskan bahwa pemerintah desa memiliki keterlibatan dalam pembentukan dan pengoperasian BUMDes melalui musyawarah desa.

## 2. Peran Pengelola BUMDes dalam Pengelolaan Unit Ketahanan Pangan

Pengelola BUMDes memiliki tanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan usaha, pengelolaan administrasi, pengelolaan anggaran, pengembangan usaha, serta pelibatan masyarakat dalam kegiatan usaha BUMDes. Dalam penelitian ini, pengurus BUMDes terdiri dari Direktur, sekretaris, bendahara, dan pengelola unit usaha yang bergerak pada bidang peternakan, perikanan, perdagangan, dan kemitraan UMKM.

Berdasarkan hasil penelitian, pengurus BUMDes melakukan pengembangan usaha ketahanan pangan setelah unit usaha penggemukan domba mengalami kegagalan. Pengembangan unit usaha baru dilakukan sebagai bentuk penyesuaian terhadap kondisi desa dan kemampuan organisasi yang dimiliki BUMDes. Unit usaha yang saat ini dijalankan berupa budidaya lele, pembibitan lele, ayam petelur, dan bebek pedaging.

Dalam pelaksanaannya, pengurus BUMDes memiliki tanggung jawab terhadap pengelolaan kegiatan usaha dan penggunaan anggaran usaha. Selain itu,

pengurus BUMDes juga melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap kegiatan usaha agar kegiatan usaha yang dijalankan dapat berjalan lebih baik dibandingkan usaha sebelumnya.

Pengelolaan administrasi menjadi salah satu bagian penting dalam pengelolaan BUMDes. Akan tetapi, berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pengurus BUMDes masih mengalami beberapa kendala dalam pengelolaan administrasi dan laporan kegiatan usaha. Keterbatasan sumber daya manusia menyebabkan pencatatan laporan keuangan dan sinkronisasi penggunaan anggaran belum berjalan secara maksimal.

Dalam teori Rosally (2015), kondisi tersebut berkaitan dengan aspek peran individu yang menjelaskan bahwa pelaksanaan peran dipengaruhi oleh kemampuan individu dalam menjalankan tugas organisasi. Keterbatasan kemampuan administrasi dan pengelolaan teknis usaha menjadi salah satu hambatan dalam pengelolaan unit ketahanan pangan BUMDes di Desa Purwasari.

Selain pengelolaan administrasi, pengurus BUMDes juga menghadapi tantangan dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap kegiatan usaha BUMDes. Pengalaman kegagalan unit usaha sebelumnya menyebabkan sebagian masyarakat masih meragukan keberlangsungan usaha yang dijalankan oleh BUMDes. Oleh karena itu, pengurus BUMDes berupaya melibatkan masyarakat dalam kegiatan usaha melalui tenaga kerja, kemitraan usaha, dan penjualan hasil usaha kepada masyarakat dengan harga yang lebih murah dibandingkan harga pasar.

Keterlibatan masyarakat tersebut menunjukkan bahwa kegiatan usaha BUMDes tidak hanya diarahkan untuk memperoleh keuntungan ekonomi, tetapi juga diarahkan untuk membantu kebutuhan masyarakat desa dan mendukung kegiatan ekonomi masyarakat. Hal tersebut sesuai dengan konsep pemberdayaan masyarakat desa yang menjelaskan bahwa BUMDes

merupakan lembaga ekonomi desa yang dibentuk untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui pengelolaan potensi desa.

Hasil penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian Emanuel Runiuk Kunja (2021) yang menjelaskan bahwa pengelolaan BUMDes dapat mengalami hambatan apabila kemampuan pengelola dan pelaksanaan monitoring organisasi belum berjalan dengan baik. Selain itu, penelitian Fifianti, Alyas, dan Mone (2018) juga menjelaskan bahwa lemahnya pengawasan organisasi dan keterbatasan kemampuan pengelola dapat mempengaruhi keberlangsungan usaha BUMDes.

### 3. Harapan Organisasi terhadap Pengelolaan Unit Ketahanan Pangan BUMDes

Harapan organisasi terhadap pengelolaan unit ketahanan pangan BUMDes diarahkan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes), membuka lapangan pekerjaan, serta membantu kegiatan ekonomi masyarakat Desa Purwasari. Harapan tersebut tidak hanya berasal dari pemerintah desa dan pengurus BUMDes, tetapi juga berasal dari masyarakat desa yang menginginkan keberadaan BUMDes dapat memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar.

Pemerintah Desa Purwasari berharap unit ketahanan pangan BUMDes dapat berkembang dan berjalan secara berkelanjutan setelah sebelumnya unit usaha penggemukan domba mengalami kegagalan. Oleh karena itu, pemerintah desa dan pengurus BUMDes terus melakukan evaluasi dan penyesuaian terhadap kegiatan usaha yang dijalankan agar sesuai dengan kondisi lingkungan desa dan kemampuan organisasi.

Selain itu, pengembangan unit ketahanan pangan juga diarahkan untuk membantu kebutuhan pangan masyarakat desa. Hasil usaha seperti telur ayam dan lele sebagian dipasarkan kepada masyarakat Desa Purwasari dengan harga

yang lebih murah dibandingkan harga pasar umum. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan BUMDes tidak hanya diarahkan pada keuntungan usaha, tetapi juga diarahkan untuk membantu kebutuhan masyarakat desa.

Dalam teori Rosally (2015), kondisi tersebut berkaitan dengan aspek harapan organisasi yang menjelaskan bahwa organisasi memiliki tujuan dan target tertentu yang ingin dicapai melalui pelaksanaan kegiatan organisasi. Dalam penelitian ini, harapan organisasi diarahkan pada pengembangan ekonomi desa, pemberdayaan masyarakat, dan keberlangsungan kegiatan usaha BUMDes.

Namun demikian, harapan organisasi tersebut masih menghadapi beberapa hambatan baik dari faktor internal maupun faktor eksternal organisasi. Faktor internal meliputi keterbatasan sumber daya manusia, pengelolaan administrasi yang belum optimal, serta kemampuan pengelolaan usaha yang masih terbatas. Sementara itu, faktor eksternal meliputi kondisi lingkungan Desa Purwasari yang berkembang menjadi kawasan industri,

#### **4. Simpulan dan Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Desa Purwasari memiliki keterlibatan langsung dalam pengelolaan unit ketahanan pangan BUMDes melalui pembinaan, pengawasan, evaluasi, pengambilan keputusan, serta pemberian dukungan anggaran dan regulasi terhadap kegiatan usaha BUMDes. Pemerintah desa bersama pengurus BUMDes juga melakukan pengalihan usaha dari penggemukan domba menjadi unit ketahanan pangan berupa budidaya lele, bebek pedaging, dan ayam petelur setelah usaha sebelumnya mengalami berbagai kendala seperti tingginya angka kematian ternak, keterbatasan sumber daya manusia, serta lemahnya pengelolaan usaha.

tingkat kepercayaan masyarakat terhadap BUMDes, dan kondisi ekonomi masyarakat desa.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan unit ketahanan pangan BUMDes di Desa Purwasari masih berada pada tahap pengembangan organisasi setelah mengalami kegagalan pada unit usaha sebelumnya. Pemerintah desa dan pengurus BUMDes masih terus melakukan penyesuaian terhadap pengelolaan organisasi dan kegiatan usaha agar BUMDes dapat berkembang dan memberikan manfaat bagi masyarakat desa.

Hasil penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian Indrawati, Adnan, dan Ibrahim (2020) yang menjelaskan bahwa pengembangan BUMDes diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendukung kemandirian desa. Selain itu, penelitian Haeril Anwar (2020) juga menjelaskan bahwa pengelolaan BUMDes diarahkan untuk mendukung kegiatan ekonomi masyarakat melalui koordinasi antara pemerintah desa dan pengurus BUMDes.

Pengelola BUMDes memiliki peran dalam pelaksanaan kegiatan usaha, pengelolaan administrasi, pengelolaan anggaran, serta pengembangan usaha ketahanan pangan. Akan tetapi, pengelolaan unit ketahanan pangan BUMDes di Desa Purwasari masih menghadapi beberapa hambatan seperti keterbatasan sumber daya manusia, pengelolaan administrasi yang belum optimal, kondisi lingkungan desa yang berkembang menjadi kawasan industri, serta rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat akibat pengalaman kegagalan usaha sebelumnya. Meskipun demikian, pemerintah desa dan pengurus BUMDes masih terus melakukan evaluasi dan penyesuaian terhadap kegiatan usaha agar BUMDes dapat berkembang dan

memberikan manfaat bagi masyarakat desa.

Harapan organisasi terhadap pengelolaan unit ketahanan pangan BUMDes diarahkan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes), membuka lapangan pekerjaan, serta membantu kegiatan ekonomi masyarakat Desa Purwasari. Berdasarkan teori Rosally (2015), pengelolaan BUMDes di Desa Purwasari dipengaruhi oleh aspek peran individu, harapan organisasi, dan lingkungan organisasi yang saling berkaitan dalam pelaksanaan kegiatan usaha BUMDes.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, peneliti memberikan saran kepada Pemerintah Desa Purwasari agar meningkatkan pembinaan, pengawasan, dan pendampingan terhadap pengelola BUMDes, khususnya dalam pengelolaan administrasi dan pengembangan sumber daya manusia. Pengurus BUMDes juga diharapkan dapat meningkatkan kemampuan pengelolaan usaha dan administrasi melalui pelatihan maupun kerja sama dengan dinas terkait agar pengelolaan kegiatan usaha dapat berjalan lebih optimal. Selain itu, pemerintah desa dan pengurus BUMDes diharapkan dapat meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam kegiatan usaha BUMDes agar tingkat kepercayaan masyarakat terhadap BUMDes dapat meningkat dan keberlangsungan kegiatan usaha dapat terus terjaga.

#### **Daftar Pustaka**

Afandi, P. (2018). *Manajemen Sumber Daya Manusia: Teori, Konsep dan Indikator*. Zanafa Publishing.

Agustina, D., & Ilhamsyah, A. W. (2021). Pengaruh efektivitas sistem informasi akuntansi dan role stress terhadap kinerja pegawai selama pandemi COVID-19. *Indonesian Journal of Accounting and Business*, 3(1), 28–43.

Anggraeni, M. R. R. S. (2016). Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) pada kesejahteraan masyarakat pedesaan studi pada BUMDes di Gunung Kidul, Yogyakarta. *Jurnal Modus*, 28(2), 155–167.

Anwar, H. (2020). *Peranan Pemerintah Desa dalam Mengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) di Desa Ulubalang Kecamatan Salomekko Kabupaten Bone* [Skripsi, Universitas Muhammadiyah Makassar].

Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (5th ed.). SAGE Publications.

Daft, R. L. (2010). *Organization Theory and Design* (10th ed.). South-Western Cengage Learning.

Etzioni, A. (1985). *Organisasi-Organisasi Modern*. Universitas Indonesia Press.

Fifianti, F., Alyas, A., & Mone, A. (2018). Peran pemerintah desa dalam pengembangan Badan Usaha Milik Desa di Desa Patani Kecamatan Mappakasunggu Kabupaten Takalar. *Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik*, 4(3), 282–296.

George R. Terry. (2014). *Dasar-Dasar Manajemen*. PT Bumi Aksara.

Handoko, T. H. (2012). *Manajemen* (2nd ed.). BPFE Yogyakarta.

Hasibuan, M. S. P. (2016). *Manajemen: Dasar, Pengertian, dan Masalah*. PT Bumi Aksara.

Indrawati, I., Adnan, M. A., & Ibrahim, M. (2020). Peran pemerintah desa dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Sulai. *Journal Pegguruang*, 2(2), 134–141.

Kasmir. (2019). *Manajemen Sumber Daya Manusia (Teori dan Praktik)*. PT RajaGrafindo Persada.

Khusaini, M. (2019). *Ekonomi Publik: Teori dan Praktik Penganggaran Pemerintah*. Salemba Empat.

- Kunja, E. R. (2019). Peranan pemerintah desa dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Fafinesu C Kecamatan Insana Fafinesu Kabupaten Timor Tengah Utara. *JIANE (Jurnal Ilmu Administrasi Negara)*, 1(1), 26–40.
- Kunja, E. R. (2021). *Peranan Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Fafinesu C Kecamatan Insana Fafinesu Kabupaten Timor Tengah Utara* [Skripsi].
- Moleong, L. J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.
- Mubyarto. (2000). *Membangun Sistem Ekonomi*. BPFE Yogyakarta.
- Mulianingsih, S. (2022). Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam mendukung pengentasan kemiskinan desa. *Jurnal Registratie*, 4(1), 10–21.
- Nurcholis, H. (2017). *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Erlangga.
- Nurjannah, S. (2020). *Peran Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Sulai* [Skripsi, Universitas Muhammadiyah Kupang].
- Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa.
- Putra, A. S. (2015). *Badan Usaha Milik Desa: Spirit Usaha Kolektif Desa*. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia.
- Ramadana, C. B., Ribawanto, H., & Suwondo. (2013). Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai penguatan ekonomi desa. *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, 1(6), 1068–1076.
- Robbins, S. P., & Judge, T. A. (2022). *Organizational Behavior* (18th ed.). Pearson Education.
- Rosally, R. (2015). *Manajemen Organisasi: Teori dan Aplikasi*. Alfabeta.
- Rudy, R. (2022). *Hukum Pemerintahan Desa*.
- Sarwono, S. W. (2015). *Teori-Teori Psikologi Sosial*. Rajawali Pers.
- Schutz, A. (1967). *The Phenomenology of the Social World*. Northwestern University Press.
- Soekanto, S. (2017). *Sosiologi Suatu Pengantar*. PT RajaGrafindo Persada.
- Solekhan, M. (2019). *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Setara Press.
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif*. Alfabeta.
- Sumodiningrat, G. (1999). *Pemberdayaan Masyarakat dan Jaring Pengaman Sosial*. Gramedia Pustaka Utama.
- Suparji. (2019). *Manajemen Badan Usaha Milik Desa: Konsep dan Implementasi*. Deepublish.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Wasistiono, S., & Tahir, I. (2019). *Prospek Pengembangan Desa*. Fokusmedia.
- Widodo, J. (2006). *Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Pustaka Pelajar.
- Yin, R. K. (2018). *Case Study Research and Applications: Design and Methods* (6th ed.). SAGE Publications.
- Yunus, R., & Anwar, A. I. (2021). *Ekonomi Publik*. Penerbit NEM.